

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 2, Djembatan, Jakarta 2008.
- Boedi, Hasono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2008.
- Cst Kansil, Christine, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Effendi Peranginangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1991.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Supriyadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Tim Mahardika, *Undang-undang Agraria*. Pustaka Mahardika, 2018.

Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan*. Pustaka Buana, 2017.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pencatatan Hapusnya Hak Tanggungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Menentukan besarnya tarif Pendaftaran Roya Hak Tanggungan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

C. Sumber Lainnya

Boedi Harsono, *“PPAT Sejarah dan Kewenangannya”*, Majalah RENVOL, Nomor 844, IV, Januari 2007.

Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001

Garwan, Irma , Dkk. 2021. *“ Tanggung Jawab Notaris atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”*, dalam *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No 1 (2021), Jurnal. Hal 27

Prawira,I. Gusti Bagus Yoga. *"Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed*. Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016.

Sudaryanto. W, *“Pokok-Pokok Kebijakan Undang-Undang Hak Tanggungan”*, Seminar Nasional Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tanggal 10 April 1996, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

<https://www.hukumonline.com> Arti Istilah Roya diakses tanggal juli 2021 pukul 10.00

wib

Contoh :

Dokumen Sertipikat

Surat Roya

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

